Pemerintah Kabupaten Paser





RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

bpbdkabpaser@gmail.com

Rancangan Renja Perubahan Tahun 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub. Kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser merupakan Rencana Kerja periode satu tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser untuk tahun berikutnya, dimana dalam Renja Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun kedepan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja lima tahun kedepan yang terdapat dalam Renstra tahun 2021-2026.

Dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah akan menganalisa setiap tujuan dan sasaran yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Demikian Rancnagan Rencana Akhir Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dibuat dan kami berharap agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Tana Paser, 04 Juli 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Paser

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681025 199303 1 005

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1-2
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud Dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penyusunan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
Tabel T-C. 29 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
Tabel T-C. 30 15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19
Tabel T-C. 31. 20
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27
Tabel T-C. 32 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 28

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 28
3.3 Program dan Kegiatan 29
Tabel T-C. 33. 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB V PENUTUP 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Paser. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021-2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan bagian dari dokumen Perencanaan yang berisi rencana kerja program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Renja merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Paser, yang mana telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

"TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA "

Untuk mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan misi dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun Misi yang diemban antara lain :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal dan tangguh dalam menghadapi Pra bencana, Tanggap darurat dan Pascabencana.
b. Memaksimalkan keterlibatan semua stakeholder dalam penyelenggaraan bencana.
c. Mewujudkan pelayanan penanganan kedaruratan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan.
d. Mewujudkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dan berkoordinasi dengan instansi terkait .

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 akan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang di dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ada beberapa landasan hukum yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang merubah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan

rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Akhir Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu satu tahun kedepan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pemenuhan SPM .

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

a. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan kegiatan dan Sub. Kegiatan.
b. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dan Sub. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana.
c. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan, dan alokasi sumber dana serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana.
d. Terlaksananya SPM yang menjadi Tanggung jawab Pemerintah Daerah khususnya bidang kebencanaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan susunan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II

Menggambarkan uraian pengukuran kinerja kegiatan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan tahun sebelumnya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB I V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah bertujuan untuk :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Umpan balik peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan melalui proses perhitungan pengukuran kinerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan melalui capaian target kinerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C. 29

Adapun tabel rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra SKPD

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai denganRenja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV											
1	*3*	*4*	5			6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
			K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	193,5		10.916.297.198	287,69	10.604.553.047	194	4.479.326.100,00		630.165.400,00		178.011.556,00		-		-		808.176.956,00	-	18,04	287,7	11.412.730.003,00	148,68	104,55	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase layanan informasi Rawan Bencana	100 %		1.279.460.814	0	-	100 %	270.000.000,00	3	9.290.000,00	4	11.086.000,00					7,5	20.376.000,00	7,55	7,55	7,5	20.376.000,00	754,67	1,59	

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten /Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	8.500	Warga/Peserta	300.000.000	0	-	8.500	Warga/peserta	270.000.000,00	-	9.290.000,00	4.325	11.086.000,00					4325	20.376.000,00	50,88	7,55	4.325,0	20.376.000,00	50,88	6,79	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100		3.192.361.817	45	1.711.993.854	100	%	744.230.320,00	12	91.725.800,00	5	40.322.804,00		-		-	17,3249	132.048.604,00	17,32	17,74	62,3	1.844.042.458,00	62,32	57,76	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten /Kota yang tertangani	75	Lokasi	1.353.300.000	45	1.044.724.148	15	Kegiatan	459.630.320,00	3	84.122.800,00	5	33.778.004,00					8	117.900.804,00	53,33	25,65	53,0	1.162.624.952,00	70,67	85,91	

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	322	Anggota	558.921.000	242	523.264.020	105 Orang	104.600.000,00			-					0	-	-	-	242,0	523.264.020,00	75,16	93,62	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kot	Jumlah PeralatanPenyelamatan Diri bagiIndividu Warga Negara,Keluarga, maupun Petugassesuai dengan jenisancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	63	Unit	250.000.000	0	-	59 unit	10.000.000,00			-					0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikutigladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100	orang	300.000.000	0	-	100 Orang	150.000.000,00		7.603.000,00		6.544.800,00				0	14.147.800,00	-	9,43	-	14.147.800,00	0,00	4,72	

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4	Laporan	500.000.000	0	-	4 laporan	10.000.000,00									0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100	%	230.140.817	63	144.005.686	1 Kawasan	10.000.000,00									0	-	-	-	63,0	144.005.686,00	63,00	62,57	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	%	6.435.161.606	100%	7.051.053.781	% 100	2.449.811.520,00	19	464.599.600,00	21	98.846.352,00	-	-	-	-	40,24	563.445.952,00	40,24	23,00	41,2	7.614.499.733,00	41,24	118,33	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100	%	4.572.271.960	10	4.709.087.087	Dokumen 5	1.402.042.520,00		319.530.000,00	1	36.146.352,00					1	355.676.352,00	20,00	25,37	11,0	5.064.763.439,00	11,00	110,77	

	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	%	1.562.889.646	1342	2.341.966.694	500 orang	659.832.000,00	216	104.830.000,00	489	62.700.000,00					705	167.530.000,00	141,00	25,39	2.047,0	2.509.496.694,00	2047,00	160,57	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500	Orang	600.000.000	0	-	500 orang	387.937.000,00	216	40.239.600,00	489	13.807.200,00					705	54.046.800,00	141,00	13,93	705,0	54.046.800,00	141,00	9,01	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	%	456.858.208	21	1.841.505.412	1 Dokumen	1.015.284.260,00	7	73.840.000,00	53	38.842.400,00	-	-	-	-	59,8763	112.682.400,00	5.987,63	11,10	80,9	1.954.187.812,00	80,88	427,74	
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	50	Kecamatan	456.858.208	21	1.841.505.412	1 Dokumen	664.284.260,00		73.840.000,00		38.842.400,00					0	112.682.400,00	-	16,96	21,0	1.954.187.812,00	42,00	427,74	

	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5	Dokumen	360.728.000	0	-	1	Dokumen	34.040.000,00									0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5	Dokumen	550.960.000	0	-	2	Dokumen	316.960.000,00									0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP (BPBD)	85		30.673.646.546	100	20.727.145.113	70		9.798.319.536,00	-	1.336.510.817,00	18	2.501.460.303,00	-	-	-	-	17,87	3.837.971.120,00	25,53	39,17	117,9	24.565.116.233,00	138,67	80,09	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	595.000.000	64	263.773.783	100	%	174.850.000,00		-		40.708.000,00		-		-	0	40.708.000,00	-	23,28	64,0	304.481.783,00	64,00	51,17	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	110.134.910	49,00	121.680.439	16	Dokumen	99.800.000,00			6	22.590.000,00					6	22.590.000,00	37,50	22,64	55,0	144.270.439,00	550,00	130,99	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	214.045.677	51,00	142.093.344	Laporan 17	75.050.000,00			6	18.118.000,00					6	18.118.000,00	35,29	24,14	57,0	160.211.344,00	380,00	74,85	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi administrasi keuangan yang terlaksana	100	%	27.963.966.122	100%	19.005.899.403	% 100	8.919.992.596,00	14	1.242.582.390,00	26	2.339.543.625,00	-	-	-	-	40,16	3.582.126.015,00	40,16	40,16	41,2	22.588.025.418,00	41,16	80,78	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Dokumen	26.698.423.765	56	18.094.676.313	Bulan 14	8.606.221.636,00	3	1.184.356.954	5	2.325.892.025,00					8	3.510.248.979,00	57,14	40,79	64,0	21.604.925.292,00	91,43	80,92	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Dokumen	1.265.542.357	48	911.223.090	Laporan 12	313.770.960,00	3	58.225.436	3	13.651.600,00					6	71.877.036,00	50,00	22,91	54,0	983.100.126,00	90,00	77,68	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.094.512.025	96	759.572.297	% 100	252.437.948,00	3	8.618.700,00	13	32.913.400,00	-	-	-	-	16,45	41.532.100,00	16,45	16,45	112,5	801.104.397,00	112,45	73,19	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26	Jenis	290.931.180	1	2.989.200	Paket 1	3.000.000,00									0	-	-	-	1,0	2.989.200,00	3,85	1,03	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	198	Jenis	290.931.180	47	214.685.785	12 Paket	30.036.000,00									0	-	-	-	47,0	214.685.785,00	23,74	73,79	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	198	Jenis	290.931.180	11	116.599.200	11 Paket	113.501.948,00									0	-	-	-	11,0	116.599.200,00	5,56	40,08	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Jenis	57.070.497	47	29.528.286	12 Paket	12.700.000,00									0	-	-	-	47,0	29.528.286,00	313,33	51,74	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2500	Eksemplar	19.488.054	995	11.842.760	12 Dokumen	3.200.000,00									0	-	-	-	995,0	11.842.760,00	39,80	60,77	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87	Kali	427.831.969	48	601.602.051	12 Laporan	90.000.000,00	3	8.618.700,00	3	32.913.400,00					6	41.532.100,00	50,00	46,15	54,0	643.134.151,00	62,07	150,32	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	100	%	270.176.163	146,513	313.583.785	100 %	101.199.992,00	14	14.595.199,00	16	16.332.378,00	-	-	-	-	31	30.927.577,00	30,56	30,56	177,1	344.511.362,00	177,07	127,51	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	785	lembar	5.100.000	180	1.750.000	Laporan 12	1.199.992,00									0	-	-	-	180,0	1.750.000,00	22,93	34,31	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	265.076.163	48	311.833.785	Laporan 12	100.000.000,00	3	14.595.199,00	3	16.332.378,00					6	30.927.577,00	50,00	30,93	54,0	342.761.362,00	450,00	129,31	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	991.711.649	100%	384.315.845	% 100	349.839.000,00	20	70.714.528,00	21	71.962.900,00	-	-	-	-	40,78	142.677.428,00	40,78	40,78	41,8	526.993.273,00	41,78	53,14	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit	126.800.000	31	229.049.725	Unit 18	339.839.000,00	5	70.714.528,00	5	71.962.900,00					10	142.677.428,00	55,56	41,98	41,0	371.727.153,00	74,55	293,16	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99	Unit	58.252.419	95	31.620.160	Unit 11	10.000.000,00									0	-	-	-	95,0	31.620.160,00	95,96	54,28	
Rata-rata capaian kinerja (%)							**92,32**		**14.277.645.636,00**						**Jumlah Realisasi Program**			**163,86**	**4.666.524.076,00**			**269,90**		**167,55**	**89,23**	
Predikat kinerja							Rendah																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dilakukan penilaian terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penilaian disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan sistem kinerja tersebut didasarkan pada input, output dan outcome, terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Secara rinci capaian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Paser

No.	Indikator	SPM /Standar nasional	IKK	Target Capaian	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026
	PENANGGULANGAN BENCANA											
1.	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang di legalisasi	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota	-	100 %	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
2.	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana) Rawan Bencana	-	150 orang	25 orang	25 orang	50 orang	50 orang	-	-	-	150 orang
3.	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	100 %	1 dokumen	-	-	-	-	-	100 %	100 %

4.	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	145 orang	40 orang	25 orang	50 orang	30 orang	-	-	-	25 orang
5.	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen
6.	Jumlah peralatan penyelematan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	10 unit	-	10 unit	10 unit	10 unit	-	-	-	10 unit
7.	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen
8.	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	50 orang	-	50 orang	50 orang	50 orang	-		50 orang	50 orang
9.	SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-		1 dokumen	1 dokumen
10.	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100 %	100 %	100%	30 orang

	kejadian bencana											
11.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	-	10 orang	-	10 orang	10 orang	-	-	-	-	10 orang
12.	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		-	-	-	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai perangkat daerah yang menangani kebencanaan maka dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, harus memprogramkan kegiatan - kegiatan yang tidak hanya bersifat responsive (tanggap darurat) namun juga menitikberatkan pada preventif atau pencegahan (siaga bencana).

Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penanggulangan kebencanaan yang diusung pemerintah saat ini yaitu penanganan bencana yang bersifat reaktif atau telah berubah menjadi pengelolaan bencana secara manajerial.

Beberapa isu - isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana saat ini, antara lain :

1. Kebijakan penanggulangan bencana di daerah belum optimal;
2. Masih tingginya tingkat kerentanan bencana;
3. Masih lemahnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana;
4. Masih minimnya informasi risiko bencana dan sistem informasi kebencanaan;
5. Belum efektifnya kesiapsiagaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana;
6. Terbatasnya alokasi pembiayaan anggaran di sektor kebencanaan.

Meskipun perencanaan dalam hal penanganan bencana telah dilaksanakan untuk meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan, serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana, namun pada saat pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang kurang koordinatif.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil Review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Paser

No.	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan			
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
A.	**PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan		9.615.430.800		Tingkat kepuasan pelayanan kesekretariatan		**9.899.394.061**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**87.425.000**		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**108.399.000**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 dokumen	49.900.000	Tana Paser	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 dokumen	70.874.000
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	37.525.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	37.525.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**8.884.937.756**		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		**8.899.937.756**

1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ 14bulan	8.606.221.636	Tana Paser	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/ 14bulan	8.606.221.636
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	278.716.120	Tana Paser	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	293.716.120
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan administrasi umum perangkat daerah		**192.029.052**				**318.224.814**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tana Paser	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.000.000	Tana Paser	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.000.000
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	113.501.948	Tana Paser	Jumlah paket peralatan dan perlegkapan kantor yang disediakan	11 paket	154.147.710
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	20.977.104	Tana Paser	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	25.977.104
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	12 Paket	6.350.000	Tana Paser	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	12 paket	6.350.000

			disediakan				disediakan		
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500 Exemplar	3.200.000	Tana Paser	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	3.200.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	45.000.000	Tana Paser	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	125.550.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadministrasian umum berjalan baik	**100%**	**101.199.992**				**158.199.992**
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	1.199.992	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	1.199.992
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	100.000.000	Tana Paser	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	157.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan BMD	**100%**	**349.839.000**		Persentase Pemeliharaan BMD		**414.632.499**

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	339.839.000	Tana Paser	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dna dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	404.632.499
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	10.000.000	Tana Paser	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	10.000.000
B.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		- **Cakupan layanan penanggulangan bencana** - **Indeks ketahanan daerah** - **Indeks Ketahanan Daerah** - **Indeks Resiko Bencana**	**75** **100%**	3.295.191.731		- **Cakupan layanan penanggulangan bencana** - **Indeks ketahanan daerah** - **Indeks Ketahanan Daerah** - **Indeks Resiko Bencana**	**100%**	**4.072.117.851**
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				**183.967.250**		**Meningkatnya Informasi kepada masyarakat tentang bencana**	**Tercapainya informasi bencana kepada masyarakat**	**183.967.250**

1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 orang	183.967.250	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 orang	183.967.250
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**70%**	**561.928.523**		**Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif**	**Jumlah daerah yang rawan bencana 10 Kecamatan**	**1.172.364.643**
1.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/kota	Kabupaten Paser	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	15 kegiatan	341.630.320	Kabupaten Paser	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	15 kegiatan	374.552.320

2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 unit	9.059.828	Kabupaten Paser	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	59 unit	324.806.018
3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tana Paser	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	114.732.120	Tana Paser	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	100 orang	114.732.120
4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tana Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	105 Anggota	84.400.000	Tana Paser	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	105 Anggota	84.400.000
6.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	7.106.255	Kabupaten Paser	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	130.290.025

7.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	5.000.000	Kabupaten Paser	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	143.584.160
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase penanganan bencana	100%	**1.878.188.879**		Presentase warga negara yang mendapat penyelamatan dan evakuasi	100%	**2.044.678.879**
1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 dokumen	1.164.456.420	Kabupaten Paser	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 dokumen	1.272.946.420
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 orang	514.783.880	Kabupaten Paser	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana	500 orang	572.783.880

3.	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	198.948.579	Kabupaten Paser	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	198.948.579
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Persentase sistem dasar penanggulangan bencana**	**100%**	**671.107.079**				**671.107.079**
1.	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	461.960.234	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	461.960.234
2.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.020.000	Kabupaten Paser	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.020.000

3.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	192.126.845	Kabupaten Paser	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	192.126.845
	JUMLAH				**12.910.622.531**	**JUMLAH**			**13.971.511.912**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan, program prioritas dan adanya rekapitulasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

Hasil perumusan program, kegiatan dan Sub. Kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Ket
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan Penanggulangan Bencana	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**4.072.117.851,00**	
1.		***Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	**183.967.250,00**	
		- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten Paser (Perjenis Bencana)	183.967.250,00	
2.		***Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana***	**1.172.364.643,00**	

		- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Paser	143.584.160,00	0
		- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	130.290.025,00	0
		- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	324.806.018,00	0
		- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten /Kota	374.552.320,00	0
		- Sub. Kegiata Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	84.400.000,00	0
		- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	114.732.120,00	0
3.		***Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	**2.044.678.879,00**	
		- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.272.946.420,00	0
		- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	572.783.880,00	0

		-	Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	198.948.579,00	0
4.			***Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	**671.107.079,00**	
		-	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/kota	461.960.234,00	
		-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	17.020.000,00	
		-	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	192.126.845,00	
			Jumlah	**4.006.601.048,00**	

Perkiraan maju berdasarkan indikator kinerja dan pagu indikatif yang telah disusun, dalam rumusan rencana program/kegiatan dan Sub. Kegiatan maka diharapkan pada tahun berikutnya dengan program , kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah ditetapkan dapat meningkat seiring dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dalam hal penanggulangan bencana.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program BPBD Kabupaten Paser. Dalam pelaksanaan program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran BPBD dan untuk memulihkan dampak buruk masyarakat yang terkena bencana menjadi lebih baik di Kabupaten Paser dan pemenuhan SPM tentang kebencanaan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPBD Kabupaten Paser agar menjadi lebih baik dimasa datang.

Demikian diharapkan rencana kinerja tahunan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan semoga dapat bermanfaat serta mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Paser.

Tana Paser, 04 Juli 2025

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Paser

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19681025 199303 1 005

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman Telp/Fax. 0543-22469 Tana Paser 76211
E-mail: bpbdpaser@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR : 050/ 46 /BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA,

Menimbang : a. bahwa menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;

c. Tim sebagaimana dimaksud di tetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Renja PD

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : Februari 2024

Kepala Pelaksana,

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.IV/V b
NIP 19681025 199303 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 050/ 46 /BPBD/2024
Tanggal : Februari 2024
Tentang : **Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025**

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

Jabatan Dalam Tim		Nama / Jabatan
Pengarah	:	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser
Penanggungjawab	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota	:	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi 4. Hermansyah 5. Marianti, A. Md 6. Yossy Yulianingsih, S.Sos 7. Nor Octavia Saputri

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP 19681025 199303 1 005

Nomor : 050/ 46 **/BPBD/2024**
Tanggal : Februari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

TAHUN 2025

1. Pengarah, yaitu:

    a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 202**5**, baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 202**5**;
    b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kelompok kerja Renja Tahun 202**5**;
    c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan Renja melalui Sekretaris BPBD Kabupaten Paser.

1. Penanggungjawab, yaitu:
    a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan Tim Penyusun Renja BPBD Kabupaten Paser Tahun 202**5**;
    b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Renja Tahun 202**5** BPBD;
    c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun kepada Kepala BPBD Kabupaten Paser.

2. Ketua, yaitu:
    a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusuna Renja Tahun 202**5** BPBD Kabupaten Paser;
    b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim penyusun Renja Tahun 202**5** BPBD;
    c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Penanggungjawab penyusunan Renja BPBD Kabupaten Paser

3. Anggota, yaitu:

    a. Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
    b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
    c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser;
    d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
    e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan;
    f. Merumuskan program prioritas;

g. Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,

Ruslan, S.Sos, MM
Pembina Tk.I / IV b
NIP 19681025 199303 1 005